

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah masalah sosial yang terus menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena kemiskinan ini sudah menjadi permasalahan yang berlangsung lama tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas hidup. Adanya lingkaran kemiskinan di suatu daerah di Indonesia merupakan fenomena penyebab sekaligus akibat sehingga apabila pemerintah mampu melakukan kebijakan anti kemiskinan yang mencakup sumber daya manusia, prasarana dasar, struktur perekonomian dan penerimaan di daerah, memungkinkan adanya peluang daerah untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Jaka Sumanta, 2005). Untuk itu Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari solusi yang dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Salah satu faktor yang menjadi pendukung untuk mengurangi angka kemiskinan, dapat kita lihat dari profil dan data kemiskinan yang ada, selain itu data tersebut juga dapat dijadikan pembandingan kemiskinan antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Berdasarkan data Nasional persentase garis kemiskinan menurut daerah dan komponen pada Maret 2023-Maret 2024 (Rp/Kapita/Bulan). Daerah, perkotaan, perdesaan, perkotaan-perdesaan, menurut garis kemiskinan makanan (GKM), non makanan (GKNM),total (GK) tiap tahun terus meningkat. Pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa antara Maret 2023 hingga Maret 2024, garis kemiskinan nasional menunjukkan

kenaikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan sebesar 5,90%, dari Rp550.458,00 per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp582.932,00 per kapita per bulan pada Maret 2024. Di sisi lain, garis kemiskinan di wilayah perkotaan naik sebesar 5,72 % dan pedesaan naik sebesar 6,06%.

(<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/31e54c0717742a2dc13300e4/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2024.html>)  
diakses pada 26 Februari 2024)

**Tabel 1.1 Garis Kemiskinan Daerah**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makan (GKM)	Non-makanan ( GKNM)	Total (GK)
1	2	3	4
Perkotaan			
Maret 2023	415.558	153.711	569.299
Maret 2024	441.394	160.477	601.871
Pedesaan			
Maret 2023	399.460	125.590	525.050
Maret 2024	424.160	132.714	556.874
Perkotaan + Pedesaan			
Maret 2023	408.522	141.936	550.458
Maret 2024	433.906	149.026	582.932

Sumber:(<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/31e54c0717742a2dc13300e4/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2024.html>)diakses pada 26 Februari 2025)

Angka kemiskinan di setiap daerah dapat dipastikan berbeda, salah satunya adalah di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang diambil dari profil kemiskinan Kabupaten Sleman persentase kemiskinan bulan Maret 2023 diketahui menyentuh angka 7,52%, sedangkan pada Maret 2024 persentase kemiskinan di Sleman menyentuh

angka 7,46%. Hal tersebut menandai bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, pada 2024 jumlah penduduk miskin di Sleman mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2023. Jumlah penduduk miskin di Sleman pada 2024 menyentuh angka 97,94 ribu orang, sedangkan pada 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 97,5 ribu orang. Berarti jika dibandingkan, maka terjadi peningkatan penduduk miskin.

(<https://slemankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/09/03/1102/profil-kemiskinan-sleman-maret-2024.html> diakses pada 26 Februari 2025)

*Tabel 1.2 Jumlah Kemiskinan Sleman 2024*

Bulan/Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2023	97,5 ribu	7,52%
Maret 2024	97,94 ribu	7,46%

Sumber: <https://slemankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/09/03/1102/profil-kemiskinan-sleman-maret-2024.html> diakses pada 26 Februari 2025)

Jika kita menilik lebih dalam lagi, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sleman ini juga dapat kita lihat dari data yang berasal dari setiap kapanewon yang menerima laporan dari setiap Kalurahan mengenai adanya data warga miskin. Salah satu contoh lokasinya adalah di Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, dengan data kemiskinan pada tahun 2023 jumlah KK miskin 255, keseluruhan penduduk miskin 796 jiwa. Sedangkan pemegang KK rentan miskin jauh berjumlah lebih banyak, yaitu 3.772 jiwa, untuk jumlah keseluruhan penduduk rentan miskin berjumlah 3.800 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2024 Pemegang KK miskin berjumlah 268, keseluruhan penduduk miskin berjumlah 830 jiwa. Sedangkan pemegang KK rentan miskin jauh

berjumlah lebih banyak, yaitu 1.431 jiwa, untuk jumlah keseluruhan penduduk rentan miskin berjumlah 3.629 jiwa.

Berdasarkan narasi tersebut dapat kita ketahui bahwa angka kemiskinan di 2024 melonjak lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023, sedangkan angka rentan miskin pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023, hal tersebut diperjelas menggunakan tabel dibawah ini.

**Tabel 1.3 Data Kemiskinan Sinduharjo**

TAHUN	KK MISKIN	JIWA MISKIN	KK RENTAN MISKIN	JIWA RENTAN MISKIN
2023	255	796	3.772	3.800
2024	268	830	1.431	3.629

**Sumber : Data kemiskinan Kalurahan Sinduharjo 2023-2024**

Organisasi pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, terutama di desa-desa yang masih menghadapi tantangan dalam menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Desa Prima Sinduharjo, sebagai salah satu contoh, adalah wadah yang memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan taraf hidup penduduknya. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangatlah krusial. Melalui kebijakan yang tepat, perencanaan yang inklusif, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah desa dapat menciptakan peluang ekonomi, serta memberdayakan masyarakat setempat.

Organisasi pemerintah desa bukan hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan kemiskinan yang ada. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menggali potensi masyarakat, pemerintah desa dapat merancang program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. Dalam konteks ini, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kebijakan dari atas, tetapi juga



pada partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan organisasi desa dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan

Sinduharjo yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah salah satu desa yang memiliki karakteristik khusus dan beragam, serta menghadapi sejumlah tantangan terkait pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun desa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, masih terdapat ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup besar di antara warganya. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayahnya, yang mengharuskan adanya tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan mengoptimalkan kinerja organisasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program yang dapat mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui program Desa Prima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa. Komitmen ini tercermin melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Pemerintah DIY menyadari bahwa pembangunan desa membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak yang harus disinergikan dan disesuaikan dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih fokus dan terarah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing desa. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di DIY, yang bertujuan untuk mengharmonisasikan pembangunan desa dengan sektor ekonomi, budaya, wisata, pangan, pengarusutamaan gender, kewirausahaan, kesehatan mental, dan pengentasan kemiskinan. Sebagai hasilnya, di DIY dikembangkan

beberapa Desa/Kalurahan Budaya yang mencakup kegiatan pariwisata, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, Desa/Kalurahan tersebut dikembangkan menjadi Desa/Kalurahan Budaya (berfokus pada kekuatan budaya), Desa/Kalurahan Wisata (berfokus pada potensi pariwisata), Desa Prima (berfokus pada pemberdayaan perempuan), dan Desa Preneur (berfokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah).

Desa Prima merupakan salah satu pilar dari Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan yang merdeka, berdaulat, memiliki integritas, dan inovatif dalam menghidupkan serta mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan kebudayaan yang dimiliki. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan untuk mencapai kelestarian alam, kesejahteraan, serta ketentraman warga dalam keragaman dan persatuan. Sedangkan Desa Prima merupakan bagian dari Desa Mandiri Budaya yang menekankan pada kesetaraan gender, serta mengintegrasikan aspek pengembangan ekonomi perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, ketahanan keluarga, pengendalian jumlah penduduk, dan program keluarga berencana.

**(<https://paniradyakalstimewan.jogjaprovo.go.id/informasi/dana-kelstimewaan-untuk-menguatkan-pemberdayaan-perempuan-rentan-melalui-desa-prima> diakses pada 26 Februari 2025)**

Program Desa Prima Sinduharjo adalah sebuah program yang terbentuk pada tahun 2022, dengan anggota berjumlah 25 orang yang terdiri dari beberapa padukuhan yang berada di Sinduharjo dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Program ini

bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, berkembang, dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Desa Sinduharjo melalui program Desa Prima diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta menciptakan pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan dalam mengelola sumber daya.

Dalam pelaksanaannya, Desa Prima Sinduharjo sangat bergantung pada aparaturnya dan juga pengurus yang ada di dalam desa prima. Aparatur berperan sebagai penyelenggara sedangkan pengurus berperan sebagai pelaksana yang nantinya dapat memfasilitasi masyarakat dengan baik, namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Desa Prima Sinduharjo, dimana ibu kamituwo mengatakan bahwa permasalahan terdapat adanya mispersepsi antar pengurus mengenai dana pembiayaan desa prima.

*"Permasalahan itu pasti ada, tetapi di Desa Prima Sinduharjo ini permasalahannya justru terjadi pada awal pembentukan, dimana saat itu terjadi mispersepsi antara pengurus Desa Prima dengan pihak Kalurahan mengenai dana pembiayaan Desa Prima. Pada saat itu ada beberapa anggota pengurus yang mengira bahwa dana pembiayaan yang diberikan dari dinas terkait berbentuk uang, namun sebenarnya jika dana tersebut sudah diserahkan ke Kalurahan, maka dana tersebut diberikan kepada Desa Prima dalam bentuk barang yang digunakan sebagai fasilitas untuk melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan Desa Prima. Nah dari peristiwa tersebut sebagian dari anggota Desa Prima memilih untuk tidak melanjutkan aktivitasnya di kepengurusan Desa Prima" ujar bu Sri Ratnawati selaku kamituwo kalurahan Sinduharjo. (Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025)*

Permasalahan di awal pembentukan Desa Prima Sinduharjo tersebut menjadi salah satu bukti bahwa banyak masyarakat di Sinduharjo berharap bahwa merupakan salah satu program yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Sinduharjo terutama



yang memiliki kartu rentan miskin dan kartu miskin khususnya perempuan. Desa Prima Sinduharjo yang berada di Kalurahan Sinduharjo, yang terletak di Jalan Kaliurang Km 10,5, Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.

Pentingnya pengukuran terhadap kinerja organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo dalam menjalankan program Desa Prima pada tahun 2023-2024 menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana pemerintah desa dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan program ini, serta mengidentifikasi dampak yang dihasilkan terhadap pengurangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Sinduharjo, terutama di desa prima yang merupakan salah satu bagian dari Sinduharjo. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana program desa prima dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi agus dwiyanto (2006:50) yang mengembangkan lima indikator utama kinerja organisasi yaitu 1.) Produktivitas, 2.) Kualitas Layanan, 3.) Responsivitas, 4.) Responsibilitas, 5.) Akuntabilitas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Kinerja Organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo Dalam Pengembangan Desa Prima"**

Penelitian ini mengkaji mengenai program Desa Prima pada tahun 2023-2024, dan memiliki tujuan untuk memahami kontribusi kinerja organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo dalam pengembangan desa prima. Selain memiliki tujuan, penelitian memiliki manfaat memberikan wawasan mengenai bagaimana kinerja sdm dapat berkontribusi terhadap keberhasilan desa prima, memperdalam pemahaman tentang bagaimana organisasi pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapatkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo dalam pengembangan desa prima ?
2. Apa saja hambatan yang ada pada kinerja organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo dalam pengembangan desa prima?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis kontribusi kinerja organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo dalam pengembangan desa prima.
2. Menganalisis apa saja hambatan yang ada pada kinerja organisasi Pemerintah Desa Sinduharjo dalam pengembangan desa prima.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana kinerja organisasi pemerintahan dapat berkontribusi terhadap keberhasilan desa prima, memperdalam pemahaman tentang bagaimana organisasi pemerintahan berperan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Manfaat Praktis :

Dari hasil penelitian ini Pemerintah Kalurahan Sinduharjo dan juga para pihak yang terlibat diharapkan dapat mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat untuk serta mengembangkan desa Prima.

### **1.5 Sistematika BAB**

Penyusunan penelitian ini merujuk pada pedoman penelitian skripsi yang dibagi menjadi beberapa bab dengan masing-masing sub yang bertujuan untuk memberikan uraian secara rinci agar isi dan susunan penelitian dapat dipahami secara jelas dan terarah.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan metode penelitian yang digunakan penulis, objek dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, serta hasil analisis dengan menggabungkan indikator teori yang digunakan dengan topik penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya